



Launching XT Square Ditunda

Dibarengkan dengan Libur Lebaran 2011

JOGJA- Pemkot Jogja menyatakan menunda launching XT-Square pada September mendatang. Sedianya, XT-Square yang bakal menjadi pasar seni dan kerajinan akan mulai beroperasi bulan Juli 2011.

"Jika dipaksakan mulai dioperasikan pada Juli, kemungkinan tidak akan optimal. Sebab sebulan sesudahnya akan memasuki bulan puasa. Jadi akan lebih baik bila XT-Square dioperasikan pada saat libur Lebaran atau September," ungkap Wali Kota Herry Zudianto kemarin (23/5).

Herry menjelaskan, penundaan *launching* semata-mata karena masalah strategi. Pihaknya ingin saat launching nanti, benar-benar mendukung optimalisasi operasional XT-Square.

Herry khawatir, jika dibuka awal Juli atau berdekatan dengan bulan Ramadan, XT Square bukannya ramai tapi malah sepi. "Makanya, kami memanfaatkan momentum Lebaran untuk bisa dikunjungi banyak wisatawan," sambung Kang Herry, sapaan akrabnya.

Seperti beberapa kali diberitakan, XT-Square yang berlokasi di lahan bekas Terminal Umbulharjo bakal diserahkan ke Perusahaan Daerah (PD) Jogjatama Vishe-sha. Untuk mengejar target launching sesuai jadwal semula, Juli 2011, pembangunan fisik XT-Square terus digenjut.

Sementara untuk pengelola, saat ini PD Jogjatama Vishesa telah memilih tiga



DOK. RADAR JOGJA

DITUNDA: XT Square atau Pasar Seni dan Kerajinan Yogyakarta (PSKY), di kawasan Umbulharjo, Jogjakarta. Foto diambil pada Jumat (4/3).

nama yang akan duduk dalam jajaran dewan direksi. Tapi, direksi yang terpilih terancam tak bisa langsung bekerja. Sebab, modal dan penyerahan aset belum bisa dilakukan seiring belum adanya payung hukum yang menaungi operasionalisasi XT-Square.

"Sudah harus ada dasar hukumnya dulu, yaitu Peraturan Daerah Pemisahan Aset dan Penyertaan Modal. Jika tidak ada dasar hukumnya, mereka tentu tidak dapat bekerja. Bagaimana membayar gaji mereka atau karyawan yang sudah direkrut?" kata Herry.

Karena itu, pemkot saat ini menunggu proses pembahasan raperda tersebut disahkan. Meski, raperda ini tak masuk dalam program legislasi daerah (pro-legda). "Setelah raperda disahkan, pelantikan direksi pun baru bisa dilakukan. Baru setelah itu-mereka bisa bekerja, termasuk rekrutmen karyawan dan juga

pemasaran," lanjutnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Ardianto menjelaskan, semua hal terkait XT Square sebenarnya menjadi wewenang eksekutif. Pihaknya sebagai wakil rakyat hanya berwenang memberikan masukan dan mengoreksi langkah-langkah yang telah dilakukan pemkot. "Kami hanya sebatas dimintai pendapat," tuturnya.

Dia mencontohkan soal seleksi calon direksi yang telah dilakukan eksekutif. Komisi B hanya dimintai pendapat. "Kami tidak turut menentukan nama-nama calon direksi yang terpilih. Semuanya menjadi wewenang eksekutif," katanya.

Ardianto hanya berharap, ketiga nama yang akan duduk di jajaran dewan direksi tersebut berasal dari kalangan yang profesional. Ini, agar nanti pengelolaan pasar seni dan kerajinan tersebut dapat optimal sesuai rencana. (eri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005